

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Suryawati, 2005). Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat (Margareni,dkk. 2016).

Indonesia mempunyai nilai yang kurang memuaskan terkait peringkat IPM di dunia. Berdasarkan klasifikasi UNDP (*United Nation Development Program*), Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori Nilai Pembangunan Menengah dan menempati peringkat 113 di dunia pada tahun 2015. Hal ini tentu cukup mengawatirkan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dan menjadi bagian dari *G20* atau 20 (dua puluh) negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat lima regional Asia Tenggara dan mempunyai nilai Indeks sebesar 0,689 di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Peringkat Indonesia yang berada di tengah ini adalah sebuah ironi dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal manusia yang

kompetitif dan mampu menjadi negara dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui melalui instrumen anggaran. Ketika suatu negara ingin meningkatkan pembangunan, maka dapat dilihat dari seberapa besar peran pemerintah. Peran pemerintah yang dimaksud yaitu alokasi anggaran yang diberikan pemerintah. Apabila semakin besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan komponen-komponen yang digunakan untuk mengukur IPM, maka semakin besar juga tingkat pembangunan manusia pada suatu negara. Sehingga besarnya alokasi pengeluaran pemerintah memiliki keterkaitan terhadap IPM di suatu negara.

Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013). Berdasarkan indikator-indikator yang menjadi landasan pengukuran IPM, maka bidang pendidikan dan bidang kesehatan memiliki peran penting untuk menciptakan sumber daya dan pembangunan manusia. Dengan demikian sekurangnya ada dua bidang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah

sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya melalui peran alokasi belanja pemerintah di bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Menurut Mangkoesoebroto (2016), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib dialokasikan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, pembayaran utang dan bunga serta dana transfer ke daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang?

3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang?

1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang

1.3 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugasnya.
2. Membuat pihak yang akan menjadi tujuan dari proposal mudah memahami tujuan dari pihak yang memberi proposal.